

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dibentuknya perbankan syariah di negara Indonesia merupakan sebuah proses perwujudan kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan lembaga keuangan yang beroperasi dalam bentuk jasa perbankan dan keuangan syariah dengan prinsip syariah. Perbankan pertama kali beroperasi di Indonesia pada tahun 1746 yang dihadirkan oleh kolonial Hindia pada masa VOC dengan nama De Bank Van Leening yang tugas utamanya untuk aktivitas perdagangan. Dalam rangka membangun bank syariah di Indonesia, dibentuk kelompok kerja setelah Musyawarah Nasional (Munas) MUI ke-4. Dengan nama Bank Muamalat Indonesia (BMI), bank syariah pertama di tanah air didirikan pada tahun 1991 dan mulai menerima simpanan pada tahun 1992. Maraknya bank konvensional yang juga menangani perusahaan berbasis syariah melalui Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi bukti bahwa peraturan yang diberlakukan mengenai Bank Indonesia telah memberikan pengaruh yang baik terhadap pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Ditetapkan peraturan tentang Bank Indonesia ini membawa pengaruh positif terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia dibuktikan dengan adanya bank konvensional menjalankan usaha berbasis syariah dengan sebutan Unit Usaha Syariah. Peraturan yang ditetapkan mengenai Bank Indonesia turut memberikan dampak positif pada perkembangan perbankan syariah di Indonesia, terlihat dengan munculnya bank konvensional yang juga mengelola usaha berbasis syariah melalui Unit Usaha Syariah (UUS).

Perbankan Syariah merupakan lembaga keuangan yang diciptakan sebagai perantara keuangan, penyedia layanan keuangan serta mengelola dana dari masyarakat yang kegiatan operasionalnya bersumber pada hukum Islam sehingga bebas dari bunga baik yang dibebankan atau membayarkan kepada nasabah. Perbankan syariah hadir dengan kontribusi penting dalam mencapai tujuan sosial-

ekonomi, di mana diharapkan dapat mendukung tercapainya prinsip ekonomi Islam. Peran perbankan syariah di Indonesia diwujudkan dalam aspek-aspek diantaranya sebagai peran nasionalisme baru untuk mendorong pembentukan jaringan ekonomi kerakyatan, memperdaya ekonomi umat dengan operasional yang transparan, memberikan layanan yang terbaik, mengendalikan spekulasi pasar, memfasilitasi distribusi pendapatan, serta memaksimalkan efektivitas mobilisasi dana dan sebagai Uswatun Hasanah pada implementasi moral (Rahma & Soemitra, 2019).

Perbankan syariah mengalami perkembangan Indonesia di dukung dengan mayoritas penduduk beragam Islam, fatwa bunga bank, tumbuhnya kesadaran beragama, menyebarnya penerapan ekonomi Islam, dan berkembangnya Lembaga keislamaan (Syafii & Harahap, 2020). Berdasarkan data statistik OJK tentang nilai Aset BUS di Indonesia pada Desember 2023 yaitu Rp. 594.709 Miliar, nilai Aset UUS di Indonesia pada Desember 2023 yaitu Rp. 274.277 Miliar, dan nilai aset BPRS di Indonesia pada Desember 2023 yaitu Rp. 23.177.364 Juta. pertumbuhan aset BUS dari tahun 2020 sampai Desember 2023 mengalami peningkatan Rp. 197,636 Miliar dengan persentase kenaikan Aset sebesar 1,497 %. Sedangkan Aset UUS dari tahun 2020 sampai Desember 2023 mengalami peningkatan Rp. 77,402 Miliar dengan persentase kenaikan Aset sebesar 1,393%. Aset BUS dan UUS mengalami peningkatan setiap tahunnya di Indonesia. Berikut adalah grafik yang menunjukkan perkembangan aset BUS dan UUS di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2023, dalam satuan miliar :



Gambar 1.1 : Grafik Perkembangan Aset Perbankan Syariah Indonesia (2020–2023)

Pada Desember 2023, Otoritas Jasa Keuangan melaporkan bahwa pertumbuhan di Provinsi Sumatera Utara, aset perbankan syariah sebesar Rp. 14.942.000.000.000 aset bank umum syariah dan Rp. 14.103.000.000.000 aset unit usaha syariah. Namun pada Kabupaten Deli Serdang hanya mencapai Rp. 336.000.000.000 aset dan tidak ada aset UUS. Kesimpulannya jumlah aset untuk BUS dan UUS di Kabupaten Deli Serdang mencapai rp. 336 miliar sehingga persentase aset sebesar 1,16%. Jika diurutkan dari jumlah aset terbesar Kabupaten Deli Serdang diperingkat 9 dari 12 kawasan wilayah Provinsi Sumatera Utara yang diperoleh dari data statistik OJK Desember 2023. Dari jumlah aset yang diperoleh memberikan gambaran bahwa Kecamatan Percut Sei Tuan masih minim jumlah nasabah yang telah menggunakan jasa perbankan syariah. Alokasi aset perbankan syariah di Provinsi Sumatera Utara disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1

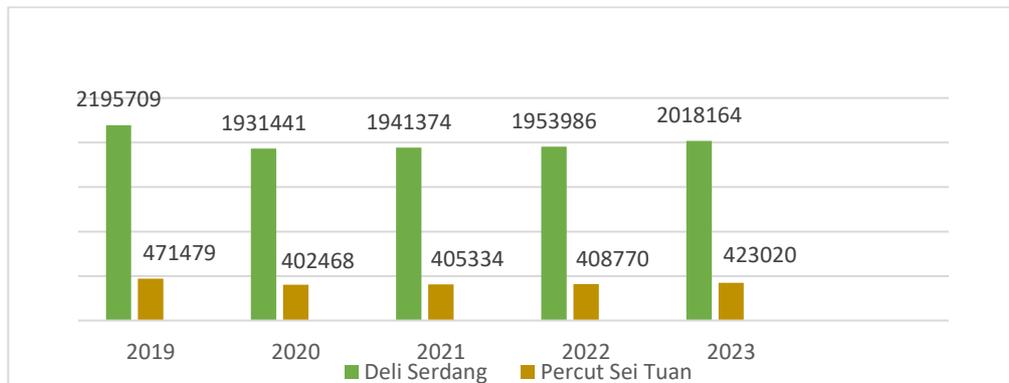
Distribusi Aset Perbankan Syariah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023

Kota/ Kabupaten	Aset BUS	Aset UUS	Total Aset
Kabupaten Deli Serdang	336.000.000.000	-	336.000.000.000
Kabupaten Langkat	-	-	-
Kabupaten Karo	-	-	-
Kabupaten Laburan Batu	740.000.000.000	-	740.000.000.000

Kabupaten Tapanuli Selatan	726.000.000.000	-	726.000.000.000
Kota Tebing Tinggi	-	485.000.000.000	485.000.000.000
Kota Binjai	697.000.000.000	-	697.000.000.000
Kota Pematang Siantar	1.259.000.000.000	380.000.000.000	1.639.000.000.000
Kota Tanjung Balai	-	-	-
Kota Sibolga	205.000.000.000	158.000.000.000	363.000.000.000
Kota Medan	10,851.000.000.000	12,758.000.000.000	23,609.000.000.000
Padang Sidempuan	1.230.000.000.000	322.000.000.000	451.000.000.000
Total	14,943.000.000.000	14,103.000.000.000	29,046.000.000.000

Sumber : OJK , Desember 2023

Salah satu kecamatan di Kabupaten Deli Serdang yang memiliki kepadatan penduduk terbesar adalah Kecamatan Percut Sei Tuan. Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang (2023), jumlah penduduk Kecamatan Percut Sei Tuan Pada bulan Desember 2023, terdapat 423.020 jiwa di Sei Tuan, atau 20,96% dari penduduk Kabupaten Deli Serdang. akibatnya, dapat dikatakan demikian bahwa Kecamatan Percut Sei Tuan akan terus eksis pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dari 22 kecamatan yang ada di kecamatan dengan kepadatan penduduk terbesar di Kabupaten Deli Serdang. Kawasan padat penduduk ini menunjukkan hal itu Kecamatan Percut Sei banyak menarik minat calon warga. Grafik yang menampilkan populasi Distrik Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kabupaten Deli Serdang dapat ditemukan di bawah ini :



Gambar 1.2: Grafik Jumlah Penduduk Kabupaten Deli Serdang dan Kecamatan Percut Sei Tuan

Kepadatan penduduk yang terjadi akan mendorong meningkatnya kemiskinan di daerah perkotaan. Tingkat kemiskinan dalam suatu wilayah dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya persentase pertumbuhan penduduk, pekerjaan dan pendapatan, tingkat pendidikan yang rendah, pemerintah tidak memberikan perhatian yang cukup, dan distribusi yang tidak proporsional (Syuhada, Yafiz, & Irham, 2024). Kepadatan penduduk diperkotaan disebabkan tingkat urbanisasi setiap tahunnya. Masyarakat urban adalah sekumpulan individu yang melakukan mobilitas yang berasal dari pedesaan menuju perkotaan dengan maksud memperbaiki kondisi perekonomian dan perubahan hidup. Manusia sebagai makhluk yang selalu tumbuh dan berkembang secara dinamis menciptakan keinginan selalu menjadi unggul di antara individu lainnya. Seiring bertambahnya waktu kebutuhan manusia meningkat, sehingga terjadi persaingan untuk memperoleh kebutuhan dengan memperjuangkan segalanya. Faktor ekonomi adalah pendorong timbulnya urbanisasi. Kebijakan pembangunan ekonomi dan pembangunan daerah perkotaan telah meningkatkan daya tarik wilayah kota besar dengan menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan serta mempermudah akses terhadap energi, informasi, dan teknologi. (Budiyanti, Safitri, & Sujarwo, 2024).

Ketersediaan lapangan pekerjaan diperkotaan menyebabkan peningkatan urbanisasi. Selain lapangan pekerjaan, pendidikan merupakan salah satu penyebab

meningkatnya urbanisasi kerana banyak pilihan perguruan tinggi sesuai impian dan jurusan yang beragam. Faktanya minat untuk menempuh pendidikan sangat minim untuk jenjang perguruan tinggi, akibatnya urbanisasi dilakukan untuk mencari lowongan pekerjaan. Tingginya jumlah angkatan kerja disertai lowongan pekerjaan terbatas memberikan dampak buruk untuk wilayah perkotaan yang mengakibatkan jumlah pengangguran dan tingkat kriminalitas meningkat (Utami & Sahetapy, 2024). Menurunnya minat masyarakat urban melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi akan berdampak terhadap tingkat pendapatan. pendidikan yang dimiliki mempermudah untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam mengatasi permasalahan pendidikan terakhir, pengalaman bekerja menjadi salah satu pertimbangan untuk diterima bekerja. Tenaga kerja yang memiliki pengalaman akan mendorong bertambahnya skill dan keahlian di bidang tersebut dibandingkan tenaga kerja baru (Kabeakan , Nasution , & Zainarti , 2023). Manusia sebagai individu yang memegang peranan dalam keberlangsungan suatu organisasi. Manusia berperan dalam perencanaan, pelaku dan yang menentukan tercapainya dari tujuan dibentuknya organisasi tersebut. Perusahaan yang beroperasi dengan peralatan canggih akan tetap memerlukan tenaga kerja dalam mencapai tujuan perusahaan (Radianti, Rahmah , Utami, & Zainarti , 2022).

Dalam menjalankan kehidupan tentunya tidak lepas dari keputusan untuk memilih, setiap manusia memperoleh hak yang sama sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukan. Setiap Masyarakat urban tentunya memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pendapatan sesuai dengan kemampuan dan skill yang dimiliki, begitu juga tentang preferensi terhadap lembaga keuangan baik yang beroperasi secara syariah maupun konvensional. Masyarakat urban dalam memutuskan pilihan terkait lembaga keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan serta keinginan tentunya memerlukan preferensi yang kuat. Preferensi merupakan sebuah tindakan mendapatkan produk yang memiliki keunggulan daripada produk sejenis karena disukai sehingga memiliki keinginan untuk memperolehnya. Setiap individu tentunya memiliki preferensi yang berbeda untuk menggunakan suatu produk atas dasar kenyamanan yang dirasakan. Mempertimbangkan kekurangan dan kelebihan dengan produk sejenisnya.

Konsep preferensi dimanfaatkan dalam mengevaluasi tingkat kepuasan konsumen terhadap ketersediaan barang dan pelayanan yang ditawarkan. Dalam kondisi sumber daya yang terbatas, teori ini membantu memahami apakah konsumen akan memilih alternatif lain untuk mencapai tingkat kepuasan yang diinginkan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan tantangan yang hadapi perbankan syariah meningkat preferensi masyarakat tidak hanya dalam pengenalan produk dalam bentuk sosialisasi secara langsung atau lewat media sosial, akan tetapi masyarakat belum berinisiatif untuk mengalihkan preferensinya dari bank konvensional padahal sudah mengetahui segala kekurangan dunia akhirat yang didapat dari penggunaan bank konvensional. Faktanya, masyarakat masih lebih memilih menggunakan bank biasa dibandingkan bank syariah karena lebih nyaman dan terjangkau terutama di daerah pedalaman, terlebih masyarakat urbanisasi tentunya berasal dari daerah pedesaan yang masih mengalami kendala untuk mengakses terhadap perubahan dan pemanfaatan teknologi yang lebih maju.

Bahkan, masih banyak mahasiswa yang beragama Islam yang belum memanfaatkan layanan perbankan syariah, padahal kemajuan teknologi sangat mudah untuk mengakses informasi yang valid tentang mekanisme bank syariah. Ditemukan bahwa mahasiswa dan pekerja mengetahui bahwa riba didalam islam dianggap haram namun masyarakat tidak mempedulikan akibat menggunakan dan memakan riba. Hal ini menyebabkan munculnya opini bahwa bank yang beroperasi secara syariah maupun konvensional dianggap setara, namun perbedaannya hanya istilah yang digunakan didalam operasional jenis bank tersebut. Dalam meningkatkan preferensi masyarakat terhadap penggunaan perbankan syariah faktor pendidikan sangatlah menentukan ketertarikan atau penolakan masyarakat itu sendiri. Ketika pendidikan sudah memadai keadaan ekonomi berhubungan terhadap preferensi perbankan syariah. Tingkat pendapatan menjadi dasar masyarakat urban menggunakan lembaga keuangan baik untuk memenuhi kebutuhan finansial atau sebagai wadah penyimpanan dana.

Dalam penetapan preferensi, hal yang dipertimbangkan Masyarakat urban terhadap pilihan perbankan baik yang beroperasi secara syariah maupun

konvensional berdasarkan kebutuhan, atribut, kepercayaan, kepuasan dan merek. Pendidikan dan pendapatan yang dimiliki masyarakat urban mendorong untuk mempertimbangkan pilihan yang tepat sesuai dengan pemahaman seputar lembaga keuangan dilihat dari keuntungan jangka Panjang yang didapatkan. Tinggi rendahnya pendidikan dan pendapatan tidak sepenuhnya menentukan preferensi, namun dengan adanya pendidikan dan pendapat masyarakat urban akan lebih teliti dan hati-hati dalam memanfaatkan teknologi yang ada untuk keamanan dan kenyamanan jangka panjang. Berikut parafrase dari kalimat tersebut:

Masyarakat dengan pendidikan tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang lembaga keuangan, terkhusus perbankan syariah yang beroperasi untuk keuntungan di dunia dan akhirat. Masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi akan memiliki kemampuan lebih untuk memilih lembaga keuangan yang aman dan nyaman untuk jangka panjang. Namun jika pendidikan dan pendapatan tidak disertai ketaatan terhadap sang pencipta, maka Masyarakat urban hanya menggunakan preferensi untuk keuntungan dunia saja, tanpa mempertimbangkan kerugian yang jangka panjang baik di dunia maupun akhirat.

Berdasarkan seluruh uraian diatas maka peneliti mengadakan penelitian di Kecamatan Percut Sei Tuan, yang mengangkat masalah dimana judulnya “Pengaruh Pendapatan dan Pendidikan Terhadap Preferensi Masyarakat terhadap Perbankan Syariah di Masyarakat Perkotaan (Studi Kasus Kecamatan Percut Sei Tuan)”. Dengan menggunakan masyarakat urban sebagai populasi penelitian akan memberikan gambaran perubahan preferensi yang diakibatkan lingkungan sosial yang baru, dimana diketahui tujuan utama terjadinya urbanisasi yaitu peluang kerja, fasilitas dan layanan, pendapatan yang lebih tinggi, kualitas hidup, pendidikan dan mobilitas sosial. Masyarakat urban akan menggambarkan perubahan pola pikir individu yang disebabkan meningkatnya pendidikan dan pendapatan disertai pengaruh lingkungan perkotaan. Dalam memperoleh gambaran tentang Masyarakat urban maka mahasiswa dan pekerja yang akan menjadi sampel penelitian.

B. Identifikasi Masalah

Informasi latar belakang yang telah diberikan memungkinkan untuk mengidentifikasi beberapa permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Percut Sei Tuan adalah kawasan dengan kepadatan penduduk pertama di Kabupaten Deli Serdang dengan persentase 20,96% dari total penduduk di Kabupaten Deli Serdang. Namun tidak mendorong pertumbuhan aset perbankan syariah di Kabupaten Deli Serdang dimana hanya memperoleh Rp. 336 Miliar sehingga persentase aset sebesar 1,16% dari keseluruhan aset perbankan syariah di Provinsi Sumatera Utara.
2. Masyarakat melakukan urbanisasi untuk mencari pekerjaan, dan sedikit yang ingin menempuh pendidikan kejenjang perguruan tinggi. Akibatnya jumlah angkatan kerja akan meningkat sedangkan lowongan pekerjaan terbatas yang mengakibatkan pengangguran dan tingkat kriminalitas meningkat.
3. Tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh persentase pertumbuhan penduduk, pekerjaan dan pendapatan, tingkat pendidikan yang rendah, pemerintah tidak memberikan perhatian yang cukup, dan distribusi yang tidak proporsional.
4. Dalam meningkatkan preferensi masyarakat terhadap perbankan syariah tidak hanya sosialisasi secara langsung atau lewat media sosial, namun masyarakat belum berinisiatif untuk mengalihkan preferensinya dari bank konvensional padahal sudah mengetahui segala kekurangan dunia akhirat yang didapat dari penggunaan bank ini.

C. Batasan Masalah

Setelah melakukan identifikasi masalah yang menyatakan bahwa terdapat 4 permasalahan yang dihadapi terhadap preferensi perbankan syariah di kecamatan percut sei tuan. Oleh karena itu, batasan masalah ditetapkan untuk memperjelas fokus permasalahan dalam studi ini. atasan masalah dalam penelitian ini adalah fokus pada aspek-aspek utama dalam menganalisis pengaruh pendidikan dan pendapatan terhadap preferensi perbankan syariah dikalangan masyarakat urban

dengan katagori pekerja dan mahasiswa. Dengan permasalahan bahwa Kecamatan Percut Sei Tuan memiliki total penduduk terpadat di Kabupaten Deli Serdang namun total aset hanya mencapai Rp. 336 Miliar atau 1,16% dari keseluruhan aset perbankan syariah di Provinsi Sumatera Utara. Padahal Kecamatan ini merupakan kawasan yang strategis didukung dengan banyaknya universitas dan perusahaan.

D. Rumusan Masalah

Setelah batasan masalah kajian telah ditetapkan, rumuskan masalah tersebut dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Apakah pendidikan mempengaruhi preferensi perbankan syariah di masyarakat urban Kecamatan Percut Sei Tuan ?
2. Apakah pendapatan mempengaruhi preferensi perbankan syariah di masyarakat urban Kecamatan Percut Sei Tuan ?
3. Apakah pendapatan dan pendidikan mempengaruhi preferensi perbankan syariah di masyarakat urban Kecamatan Percut Sei Tuan perbankan syariah ?

E. Tujuan penelitian

Berikut pembahasan rumusan masalah, berikut tujuan penelitian:

- a. Untuk menganalisis pengaruh variabel pendidikan terhadap preferensi perbankan syariah pada masyarakat urban di Kecamatan Percut Sei Tuan.
- b. Untuk menganalisis pengaruh variabel pendapatan terhadap preferensi perbankan syariah pada urban di Kecamatan Percut Sei Tuan.
- c. Untuk menganalisis pengaruh variabel pendidikan dan pendapatan saling berinteraksi dalam membentuk preferensi perbankan syariah pada kalangan masyarakat urban di Kecamatan Percut Sei Tuan.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai kepentingan. Berikut ini adalah apa yang ingin Anda capai:

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini berfungsi sebagai sarana dalam mengaplikasikan ilmu yang telah ditelaah serta sebagai langkah untuk mengembangkan pengetahuan, terkhusus pada

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Melalui penelitian ini, wawasan akan semakin luas dan menjadi sarana untuk mengkaji secara ilmiah mengenai dampak yang disebabkan pendidikan beserta pendapatan terhadap preferensi perbankan syariah di kalangan masyarakat urban, dengan studi kasus berlokasi pada Kecamatan Percut Sei Tuan.

b. Bagi Universitas

Dengan diadakan penelitian ini diharapkan bermanfaat kepada universitas Sebagai acuan berupa pertimbangan, perbandingan, serta kontribusi bagi penelitian di masa mendatang.

c. Bagi Pihak yang Terlibat

Digunakan sebagai referensi dalam landasan kebijakan upaya melakukan perbaikan preferensi masyarakat urban di Kecamatan Percut Sei Tuan, terkhususnya untuk pemahaman tentang bank syariah yang di ukur dari faktor pendidikan dan pendapat. Dengan mengangkat variabel pendidikan dan pendapat kedepannya pemerintah daerah Kecamatan Percut Sei Tuan akan mendukung peningkatan SDM agar Indeks Pertumbuhan Ekonomi dapat bersaing dengan Kecamatan Lainnya di Kabupaten Deli Serdang.

d. Bagi Pihak Lain

Sebagai referensi informasi dan panduan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya di masa depan, untuk mendukung terciptanya masyarakat yang lebih baik. Dengan diangkatnya topik ini, penulis berharap pembaca dapat wawasan baru sehingga lebih mengedepankan layanan keuangan yang sesuai dengan syariah islam dengan harapan dana untuk pendidikan dan pendapatan lebih aman dan terhindar dari bunga dan riba.